SKRIPSI

YAYASAN PEMERHATI MASALAH PEREMPUAN SULSEL DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA MAKASSAR

SEPTI PRAESCILIA MANURUNG
E041201003

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

YAYASAN PEMERHATI MASALAH PEREMPUAN SULSEL DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA MAKASSAR

SEPTI PRAESCILIA MANURUNG
E041201003

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN PENGAJUAN

YAYASAN PEMERHATI MASALAH PEREMPUAN SULSEL DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA MAKASSAR

SEPTI PRAESCILIA MANURUNG
E041201003

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1
Program Studi Ilmu Politik

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

iii

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

YAYASAN PEMERHATI MASALAH PEREMPUAN SULSEL DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA MAKASSAR

SEPTI PRAESCILIA MANURUNG
E04121003

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana S1 pada tanggal
bulan tahun dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Proram Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan;

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.	**Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si**
NIP. 19651109 199103 1 008	**NIP. 19730813 199802 2 001**

Mengetahui ;
Ketua Departemen Ilmu Politik

Dr. Sakinah Nadir,S.IP., M.Si
NIP. 19791218 200812 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul "Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Makassar" adalah karya saya dengan arahan dari pembimbing, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M. Si. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 25 Mei 2024

Septi Praescilia Manurung
NIM E041201003

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Makassar" guna memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penulis mengetahui bahwa penulis tidak akan bisa sampai pada tahap ini tanpa bantuan dari orang – orang terkasih, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada orang tua penulis, Bapak Holong Manurung dan Mendiang Ibu Sinurnayan Siregar yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan, serta memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis dari dulu hingga sekarang. Tak lupa juga kepada kakak dan adik penulis, Millenia Tercia Manurung, S.AP dan Bornia Manurung yang telah senantiasa menemani, mendukung dan memberikan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga memberikan penghargaan setinggi - tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dosen Penasehat Akademik Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D** (Alm) yang telah membantu dan membimbing penulis sampai waktunya. **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku pembimbing utama dan Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si** selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan arahan, meluangkan waktu dan pikiran terhadap penulis hingga selesainya skripsi ini dan ujian akhir. Bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si** dan Ibu **Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si**, selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian akhir.

Kepada seluruh dosen Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan. serta seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.

Kepada **Kak Pino (Aflina Mustafainah)** yang telah bersedia menjadi narasumber utama penulis serta mendampingi penulis dari awal hingga terselesainya proses penelitian ini serta Ibu **Jusmiati Lestari, S.Ag** dan Ibu **Nurlina** yang juga telah menjadi narasumber dan memberikan kesempatan dan bantuan bagi penulis untuk dapat melangsungkan penelitian sehingga memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Teman - teman dalam kepengurusan **Himapol FISIP Unhas** periode 2021 - 2022 yang telah memberikan semangat dan menjadi tempat penulis belajar tentang berlembaga. Teman - teman **Dinamis 2020** yang telah senantiasa memberikan bantuan, semangat dan support dalam penulisan skripsi ini. Terkhusus **Triza, Umi, Lidia, Awita, Fani, Zam, Tasya, Marlina, dan Lela.**. Seluruh teman-teman **Ilmu Politik 2020** yang telah membersamai dari mahasiswa baru hingga sekarang. Teman - teman **KKNT Pertanian Organik Gelombang 110 Bulukumba**, khususnya Posko 08 Desa Sipaenre,

Kak Kul, Wahyu, Ima, Nunung, Aqilah, Mila, dan Sakinah yang senantiasa menghibur dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sahabat - sahabat penulis yang sudah membersamai penulis dari SMA hingga sekarang, **Grace, Sheryl, Cheryl, Pewe, Priss, Ophel, Gete** yang senantiasa menghibur, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Panjang umur pertemanan. Dan juga kepada pihak - pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang juga tidak berhenti untuk memberikan *support* kepada penulis. Penulis mengucapkan banyak - banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaanya. *God Bless You All.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pihak - pihak yang membutuhkan.

Makassar, 25 Mei 2024

Septi Praescilia Manurung

ABSTRAK

Septi Praescilia Manurung. NIM E041201003 : ***Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Makassar*****.** Di bawah bimbingan **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si dan Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel dalam menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2024, khususnya dalam membantu calon legislatif perempuan untuk menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Makassar. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial baru.

Dasar penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitiaan deskriptif, dimana tipe penelitian ini menggambarkan secara jelas mengenai masalah - masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Teknik analisa data pada penelitian ini yakni dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dan dalam memastikan keabsahan data, peneliti menguji kredibilitasnya dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun sumber data yang didapatkan meliputi data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel telah melakukan beberapa gerakan sosial baru sebagau upaya mereka dalam membantu caleg perempuan di Kota Makassar. Adapun upaya yang dilakukan YPMP Sulsel untuk membantu calon legislative perempuan di Kota Makassar dalam menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2023 yaitu ; Pertama, menuntut anggaran kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan dana guna menjalankan program kerjanya. Kedua, mempromosikan calon legislative perempuan kepada pemilih, hal ini dilakukan agar warga dapil mengetahui ada caleg permepuan yang pro rakyat khususnya kaum perempuan dan dilakukan dengan mendatangi warga secara *door to door*. Ketiga, mengadakan forum diskusi, hal ini dilakukan bersama dengan calon legislative perempuan yang mempunyai hubungan emosional dengan individu di YPMP Sulsel, dimana membahas mengenai strategi atau kiat – kiat pemenangan calon legislative perempuan tersebut.

Kata Kunci : YPMP, Perempuan, Calon Legislatif, Gerakan Sosial Baru

ABSTRACT

Septi Praescilia Manurung. NIM E041201003 : *Women Concern Foundation of South Sulawesi in Facing the 2024 Legislative Election in Makassar.* *Supervised by* **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si and Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**

This research aims to find out the efforts of the Women Concern Foundation of South Sulawesi in facing the 2024 Legislative Election, especially in helping female legislative candidates to face the 2024 Legislative Election in Makassar. The theory used in this research is the theory of new social movements.

The basis of this research uses qualitative research with a descriptive research type, where this type of research clearly describes the problems being studied based on the experiences experienced by the informants. The data analysis technique in this research is by using interviews and documentation. And to ensure the validity of the data, the researcher tested its credibility using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data sources obtained include primary and secondary data.

The results of this research show that the South Sulawesi Women's Issues Observer Foundation has carried out several new social movements as part of their efforts to help female legislative candidates in Makassar City. The efforts made by YPMP South Sulawesi to help female legislative candidates in Makassar City in facing the 2023 Legislative Election, namely; First, demand a budget from the government to obtain financial assistance to carry out its work program. Second, promoting female legislative candidates to voters. This is done so that electoral district residents know that there are female legislative candidates who are pro-people, especially women, and is done by visiting residents door to door. Third, holding a discussion forum, this is done together with female legislative candidates who have emotional relationships with individuals at YPMP South Sulawesi, where they discuss strategies or tips for winning for female legislative candidates.

Keywords: YPMP, Women, Legislative Candidates, New Social Movements

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGAJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN ..... Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Rumusan Masalah **4**
1.3 Tujuan Penelitian **4**
1.4 Manfaat Penelitian **5**
1.5 Penelitian Terdahulu **5**
1.6 Teori Gerakan Sosial Baru **6**
1.7 Kelompok Kepentingan **11**
1.8 Kerangka Berfikir **13**
1.9 Skema Berfikir **14**
BAB II METODE PENELITIAN **15**
2.1 Tipe dan Jenis Penelitian **15**
2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian **15**
2.3 Jenis dan Sumber Data **16**
2.4 Teknik Pengumpulan Data **16**
2.5 Teknik Analisis Data **17**

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 19
3.1 Gambaran Umum Kota Makassar **..... 19**
3.1.1 Keadaan Penduduk 19
3.1.2 Daftar Pemilih Tetap Kota Makassar 20
3.1.3 Pembagian Daerah Pemilihan DPRD Kota Makassar 21
3.2 Gambaran Umum YPMP Sulawesi Selatan 23
3.2.1 Susunan Pengurus YPMP Sulsel 24
3.3 Upaya Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel dalam Membantu Caleg Perempuan tahun 2024 di Kota Makassar **..... 25**
BAB IV PENUTUP 31
4.1 Kesimpulan**..... 31**
4.2 Saran**..... 31**
DAFTAR PUSTAKA..... 33
LAMPIRAN 36

DAFTAR TABEL

No. Urut Halaman

1. Jumlah Penduduk di Makasar berdasarkan Kecamatan 19
2. Jumlah Pemilih Tetap berdasarkan Kecamatan di Makassar 20
3. Pembagian dapil dan kursi DPRD Kota Makassar 21

DAFTAR GAMBAR

No. Urut Halaman

1. Peta Kota Makassar.....19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit / kesatuan, kesatuan tersebut bisa diartikan masyarakat / negara (Rusadi Kantaprawira, 2005: 31). Sedangkan Gabriel A. Almound menyatakan bahwa sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Secara umum, sebuah sistem politik ditandai oleh adanya fungsi – fungsi politik. Fungsi – fungsi politik dalam suatu sistem politik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi input yang mencakup artikulasi kepentingan, sosialisasi politik dan rekrutmen politik, serta fungsi output yang melibatkan pembuatan, pelaksanaan dan penilaian kebijakan.

Kemampuan sistem politik dalam menanggapi berbagai tuntutan dan dukungan yang diterimanya, serta menguraikannya kedalam bentuk kebijakan atau *output* yang tepat, dapat menjadi tolak ukur ke-efektivitasan suatu sistem politik. Setiap hasil kebijakan mencerminkan proses politik yang memperlihatkan bahwa terdapat beragam aspirasi yang timbul akibat dari beragamnya kepentingan masyarakat. Namun dalam sistem politik, aspirasi yang timbul tidak hanya dapat diwakili oleh kekuatan – kekuatan politik formal seperti partai politik yang dimana memang memiliki peran resmi sebagai penyalur aspirasi, melainkan dapat melalui kekuatan politik lainnya yakni kelompok kepentingan (*interest group*).

Menurut David B. Truman, kelompok kepentingan adalah sebuah kelompok pembagi sikap yang akan membuat klaim tertentu kepada instansi pemerintah. Kelompok kepentingan seringkali di definisikan sebagai, *a group of persons who share a common cause, wich puts then into political competation with orther groups of interest* (Bendit 1975:34). Pada definisi tersebut, kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintah (Janda, Berry,dan Goldman 1997).

Di Indonesia, beberapa kelompok kepentingan telah muncul sebelum partai – partai politik. Mereka beraktivitas di berbagai sekrtor seperti sosial, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Salah satu penyebab munculnya kelompok kepentingan yaitu adanya isu – isu baru yang menarik perhatian masyarakat, baik di tingkat local, nasional, maupun internasional. Bahkan, dewasa ini, banyak kelompok kepentingan yang secara aktif mengadvoksi isu – isu yang sangat spesifik. Isu – isu tersebut meliputi permasalahan kekerasan terhadap anak, perdagangan bebas, lingkungan, perdagangan manusia, hak asasi manusia, hak konsumen, perlindungan binatang, pendidikan kaum marginal, transgender, dan sebagainya termasuk perempuan.

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada kelompok kepentingan atau organisasi pergerakan perempuan. M.C Ricklefs dalam bukunya berjudul *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004* (2005) berpendapat bahwa munculnya organisasi perempuan di Indonesia dipengaruhi oleh implementasi kebijakan Politik Etis yang dilakukan oleh pemerintah colonial Belanda. Misi utama dari organisasi perempuan di Indonesia adalah untuk memajukan status perempuan pribumi dalam bidang sosial, politik, dan pendidikan. Pada tahun 1912, muncul organisasi perempuan pertama di Indonesia bernama Putri Mardika. Poetri Mardika merupakan organisasi yang bertujuan memberikan motivasi kepada perempuan pentingnya meningkatkan taraf hidup para perempuan baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sosial (Suryokhondro, 1984). Poetri Mardika mencita-citakan kemajuan terhadap perempuan agar mereka tidak lagi terbatas oleh norma – norma tradisional, melainkan didorong untuk aktif dalam upaya meningkatkan status mereka.

Setelah berdirinya Poetri Mardika, dalam tahun-tahun berikutnya berbagai organisasi ataupun perkumpulan bermunculan baik yang didukung oleh organisasi laki-laki maupun yang terbentuk secara mandiri oleh perempuan sendiri. Misalnya, Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun-PIKAT (Manado, 1917), Purborini (Tegal, 1917), Aisyiyah atas bantuan Muhammadiyah (Yogyakarta, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poteri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moeljo (Yogyakarta, 1920), Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit Tinggi, 1920), Wanito Katolik (Yogyakarta, 1924).[1]

Masa kini, kaum perempuan sudah tercerahkan. Perjuangan pergerakan perempuan semakin nyata dan karena itu pula peran perempuan dalam membangun pendidikan bangsa semakin besar. Salah satu hasil dari perjuangan pergerakan perempuan di Indonesia yakni adanya kesempatan bagi kaum perempuan untuk melibatkan dirinya secara langsung dalam ranah politik. Pada saat ini, keterlibatan perempuan dalam ranah politik tampak lebih nyata. Di lembaga legislatif keterlibatan perempuan didukung oleh undang – undang yang ada, terkait dengan pemberian hak bagi perempuan untuk masuk keranah publik. Undang – undang partai politik dan Pemilu telah mewajibkan setiap partai untuk mengajukan calon anggota legislatif perempuan minimal tiga puluh persen (30%).

Di Kota Makassar, jumlah keterwakilan perempuan di legislatif pada Pemilu Legislatif 2019 mengalami peningkatan hingga 13 orang dari 50 kursi anggota DPRD Sulsel atau 26 persen kuota kursi perempuan, yang dimana pada tahun 2014 keterwakilan perempuan di parlemen hanya menyentuh angka 8 orang. Walaupun telah mengalami peningkatan, namun secara kuantitatif jumlah tersebut masih berada dibawah kuota 30% yang ditetapkan oleh peraturan

[1] Saskia E. Wieringa, Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950, (Jakarta: Kalyanamitra, 1998), hal. 3

perundang – undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kuota tersebut belum mampu dimaksimalkan oleh perempuan dan partai politik.

Melihat fakta tersebut, dapat dikatakan keterwakilan perempuan di parlemen masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya seperti terbatasnya jumlah kaum perempuan yang memiliki kualitas yang mumpuni di bidang politik. Maka dari itu, diperlukan strategi khusus untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, salah satunya yakni dibutuhkannya peran organisasi masyarakat terutama organisasi nonpemerintah atau NGO (*Non Government Organisation*) perempuan untuk melakukan lebih banyak penelitian dan kajian untuk peningkatan jumlah perempuan di bidang politik. NGO perempuan memiliki peran penting untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dengan mendorong dan mempersiapkan perempuan sebagai sumber daya manusia yang berpotensi bersaing dalam bidang politik. Dikarenakan memiliki basis sosial yang kuat di akar rumput, perempuan dari jejaring NGO dianggap berpotensi tinggi untuk meduduki kursi legislatif.

Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan (YPMP Sulsel) merupakan salah satu organisasi perempuan non pemerintah yang ada di Sulawesi Selatan dan berpusat di Kota Makassar. Organisasi ini secara aktif mendukung dan memperjuangkan hak – hak perempuan Sulawesi Selatan diberbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial sampai politik. Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan sudah berdiri sejak tahun 1994, hal ini menjadikan YPMP Sulsel menjadi salah satu organisasi perempuan tertua yang didirikan berdasarkan isu – isu kritis perempuan. YPMP Sulsel dulunya bernama Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan (FPMP Sulsel). Perubahan nama tersebut terjadi pada tanggal 28 Juni 2022. Visi dari YPMP Sulsel yakni terwujudnya keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan yaitu sosial, budaya, politik dan lingkungan dengan perspektif HAM dan Feminis untuk masyarakat yang madani.

Adapun program – program yang dilakukan oleh YPMP Sulsel yakni ***Satu***, menyelenggarakan pelatihan untuk menumbuhkan kesamaan persepsi terhadap misi FPMP Sulsel. Pelatihan ini memberikan materi tentang prinsip – prinsip yang diperjuangkan dalam gerakan perempuan secara makro, seperti masalah kesetaraan gender, hak – hak perempuan dan pendidikan politik serta kampanye pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. ***Dua***, menyelenggarakan seminar, *workshop* dan pelatihan terhadap perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan persamaan persepsi tentang keadilan dan keseteraan gender dalam seluruh aspek kehidupan. ***Tiga***, mengupayakan pendekatan kepada pemerintah untuk memberikan prioritas utama pada pengembangan peran dan fungsi perempuan sebagai mesin pembangunan. ***Empat***, membuat brosur, KIE, bulletin, modul, kliping, dan bahan bacaan. ***Lima***, pengadvokasian keadilan dan kesetaraan gender serta kampanye keadilan dan kesetaraan gender.

Dalam bidang politik, YPMP Sulsel bersama dengan beberapa lembaga swadaya lain, yakni Forum Informasi & Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulsel, Lembaga Riset Pengembangan Kapasitas Masyarakat (LRPKM) Sulsel, serta Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, bekerja sama menggagas suatu program pelatihan yang bernama *Program Women's Participation for Election in South Sulawesi*. Program ini dibuat dengan harapan dapat membangun partisipasi politik perempuan di Sulsel. Program pelatihan ini dilaksanakan pada Oktober 2022, yang diisi dengan pemberian materi – materi terkait pengetahuan umum kepemiluan dan gender, exercise serta pendampingan terhadap peserta pelatihan. YPMP Sulsel juga secara aktif mendukung calon legislative perempuan yang ada di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2009, YPMP Sulsel pernah mengadakan forum public yang bernama "Temu Calon Legislator Perempuan dan Konstituen". Kegiatan ini diadakan untuk mempertemukan para calon legislative perempuan yang ada di Sulawesi Selatan termasuk Kota Makassar dengan para konstituen, dimana kegiatan ini membahas mengenai kiat – kiat yang akan dilakukan untuk pemenangan perempuan dalam pemilihan umum yang sebelumnya telah dilakukan pelatihan – pelatihan bagi konstituen dengan voter education dan caleg perempuan dengan pelatihan public speaking, pengembangan isu yang dekat dengan masyarakat dan lain – lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai organisasi non-pemerintah (NGO) dalam hal ini Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan (YPMP Sulsel) dalam mendukung para calon legislatif perempuan pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Makassar, agar dapat memperjuangkan dan melindungi hak kaum perempuan serta meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen agar dapat memenuhi kuota 30% yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Makassar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang menjadi focus perhatian adalah sebagai berikut : "Bagaimana upaya organisasi Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel dalam mendukung calon legislatif perempuan menghadapi Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Makassar?"

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : "Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh organisasi Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel dalam mendukung calon legislatif perempuan menghadapi Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Makassar."

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini.Dalam hal ini membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat akademik dan manfaat praktis.

A. Manfaat Akademik

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang berminat mengetahui upaya organisasi Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel dalam mendukung para calon legislatif perempuan menghadapi Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Makassar

b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian di tempat lain.

c. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengetahui ikhtiar organisasi Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel dalam mendukung calon legislatif perempuan menghadapi Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Makassar

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pada penjelasan diatas, penulis akan membahas mengenai konsep dan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini dan juga sebagai landasan penulis dalam menuliskan hasil penelitian. Adapun teori yang akan dijelaskan yaitu teori gerakan sosial baru dan kelompok kepentingan. Dalam ini juga akan diuraikan kerangka pemikiran yang digambarkan dalam skema berpikir.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai upaya untuk mendapatkan referensi atau melakukan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan yang dimana berjudul "Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Makassar".

Dengan berbagai literatur adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yanuardi pada tahun 2014, dengan judul penelitian Advokasi Perkumpulan NARASITA dalam Memperjuangkan Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014. Penelitian ini membahas mengenai upaya organisasi perempuan dalam hal ini NARASITA untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus penelitian tentang bagaimana upaya organisasi perempuan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek/subjek penelitian yang dimana penelitian ini menjadikan masyarakat sebagai subjek penelitiannya sedangkan penulis menjadikan beberapa caleg perempuan sebagai subjek penelitian.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Charla Megita Supit pada tahun 2020, dengan judul penelitian NEW SOCIAL MOVEMENT (Studi Tentang YRBK sebagai Gerakan Literasi dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Politik Kaum Milenial di Kota Banjar). Penelitian ini membahas mengenai upaya Yayasan Ruang Baca Komunitas (YRBK) untuk mewujudkan kesadaran politik kaum milenial di kota Banjar melalui Gerakan literasi yang mereka lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitiian yang dilakukan oleh penulis terletak pada sama – sama menggunakan teori Gerakan sosial baru sebagai acuan dalam penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis organisasi yang diteliti, yang dimana penelitian ini mengambil YRBK yang dimana merupakan suatu komunitas literasi, sedangkan penulis mengambil organisasi perempuan dalam hal ini YPMP Sulsel sebagai subjek penelitian.

1.6 Teori Gerakan Sosial Baru

Tarrow dalam Budiardjo (2008;383) menjelaskan bahwa gerakan sosial adalah tantangan kolektif oleh orang – orang yang memiliki tujuan bersama berbasis solidaritas, yang dilaksanakan melalui interaksi terus menerus dengan para elite, lawan – lawannya dan pejabat – pejabat. Menurut Cook (1995), gerakan sosial mencakup beberapa konsep , yaitu berorientasi perubahan (*change oriented goals*), tingkat organisasi (*some degree of organization*), tingkat kontinyuitas yang sifatnya temporal (*degree of temporal continuity*), dan aksi kolektif diluar lembaga (aksi jalanan) dan di dalam lembaga/lobi politik (*some extrainstitutional and institutional*).[2]

[2] Purwaningrum, T. A. (2016). Habitus, Modal, Ranah dan Praktik Sosial Komunitas Jejer Wadon dalam Melakukan Gerakan Sosial Baru di Kota Surakarta.

Dalam konteks kontemporer, terjadi perubahan yang signifikan daam wacana Gerakan sosial, yang mengarah pada munculnya perspektif baru mengenai Gerakan sosial yang berakar dari Eropa Barat, dikenal sebagai Gerakan Sosial Baru (New Social Movement). Jika pada masa Gerakan sosial yang berkembang pada tahun 1940 hingga 1960-an, Gerakan sosial sering kali dianggap sebagai gejala penyimpangan, irasional, dan bahkan dianggap sebagai penyakit sosial, maka pada era studi yang berkembang dari tahun 1960-an hingga 1970-an dan 1980-an hingga sekarang, Gerakan sosial baru dianggap sebagai Gerakan yang mulai muncul pada decade 1960-an. Gerakan ini menggarisbawahi berbagai isu yang berbeda dari Gerakan sebelumnya, yang tidak hanya berfokus pada redistribusi ekonomi atau pertempuran kelas sosial, tetapi lebih menitikberatkan pada isu – isu hak asasi manusia, identitas, gaya hidup dan aspek budaya.

Gerakan Sosial, yakni perspektif Gerakan Sosial Baru muncul sekitar era tahun 1960-an dan 1970-an terutama di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika (Singh, 2001:96). Prinsip - prinsip dan nilai - nilai yang menjadi tujuan esensial dari gerakan ini secara universal ditujukan untuk melindungi dan menjaga kondisi kehidupan manusia menuju perbaikan yang lebih baik. Teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movement) merupakan suatu pendekatan teoritis terbaru yang menjelaskan tentang perubahan karakter dari Gerakan Sosial (Social Movements), New Social Movement Theory menekankan ciri khas gerakan sosial dalam perkembangan masyarakat pasca-industri (post-industrial) di Amerika Utara dan Eropa Barat (Melucci, 1980; McAdam, McCarthy, & Zald 1988, Kriesi, 1989; Pakulski, 1993; dalam Macionis, 1999:621). Teori Gerakan Sosial Baru berakar dari tradisi Eropa Kontinental tentang Teori Sosial dan Filsafat politik. Teori ini merupakan suatu pendekatan sebagai respons terhadap kelemahan Marxisme klasik dalam menganalisis tindakan kolektif (Sukmana, 2016:117).

Dasar dari kelompok ini adalah “protes”. Mereka sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat, dan merasa “terasingkan” (alienasi) dari masyarakat.[3] Mereka berkeinginan untuk menwujudkan desentralisasi kekuasaan negara dan pemerintah, partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat, terutama masyarakat lokal. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu pendekatan yang mereka pilih adalah dengan mendirikan berbagai kelompok yang memiliki kepedulian terhadap isu - isu kontemporer seperti lingkungan, gerakan perempuan, hak asasi manusia, dan gerakan antinuklir. Selain itu gerakan sosial baru ini lebih menekankan kebebasan pada gerakan mereka itu sendiri seperti tidak memliki struktur organisasi (adanya rantai komanda), tidak terbirokratisasi, mempunyai kepentingan atau issue perjuangan yang sama. (Budiardjo 2010).

[3] Saputra, A. A. (2021). Kelompok Kepentingan Dan Gerakan Sosial Baru Dalam Proses Kebijakan Politik.

Gerakan sosial terbentuk melalui aksi kolektif yang utamanya menonjol dalam kerangka Gerakan sosial yang lebih baru. Pada abad ke-19, kemunculan beragam gerakan seperti Gerakan perempuan, Gerakan lingkungan, dan Gerakan perdamaian telah mencapai sorotan yang semakin tajam. Gejolak – gejolak ini muncul sebagai respons terhadap perubahan yang telah terjadi dalam lingkup global belakangan ini. Sebagai contoh, Gerakan perempuan timbul sebagai hasil dari peningkatan kesadaran terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan, dengan aspirasi menuju kesetaraan gender, upah yang setara, legalisasi aborsi, dan berbagai isu lain yang terkait dengan peran perempuan.kemunculan Gerakan sosial baru dipandang sebagai bukti bahwa kekuatan di masyarakat semakin kohesif dan semakin kuat, sehingga membawa kemunculan kekuatan baru dalam struktur suatu bangsa.

Gerakan sosial baru menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan Gerakan sosial lama (klasik), yang dimana ditandai dengan focus pada wacana anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Dalam kontras yang jelas, Gerakan sosial baru menampilkan sifat pluralistic yang mencakup isu – isu seperti penolakan terhadap rasisme, antinuklir, pelucutan senjata, feminisme, kepedulian terhadap lingkungan hidup, hingga isu – isu perdamaian. Gerakan ini juga menyadari perlunya paradigma baru tentang aksi kolektif, model kebudayaan dan masyarakat alternative, serta pemahaman baru dari komunitas – komunitas mereka.

Gerakan sosial baru menurut Sztompka (2010:336) memiliki karakteristik : (a) sebagai reaksi atas ekonomi, ekologi, politik, teknologi, birokrasi terhadap kehidupan manusia. Focus dari Gerakan ini tertuju pada memperluas ruang kehidupan, memperjuangkan hak masyarakat sipil dengan nilai lunak, non ekonomi, dan post material; (b) keanggotaanyya tiddak berkaitan dengan kelas tertentu. Memiliki kesadaran yang lebih tinggi karena kebebasan untuk memanfaatkan waktu, pemikiran, dana dan tenaga yang jauh lebih besar; (c) Gerakan sosial baru biasanya mengambil bentuk jaringan yang lebih luas dan relative longgar daripada menggunakan organisasi yang kaku. Berbagai isu yang diperjuangkan Gerakan sosial ini, misalnya perjuangan untuk hak asasi manusia, perjuangan hak – hak kelompok LGBT, hak – hak perempuan, dampak globalisasi, dan sebagainya.

Secara garis besar, aktor-aktor sosial dalam Gerakan Sosial Berbasis (GSB) berasal dari latar belakang sosial yang beragam, melewati berbagai kategori seperti gender, pendidikan, okupasi, atau kelas sosial. Mereka yang terlibat dalam Gerakan sosial baru tidak didorong oleh motif kelas, melainkan oleh tekad untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun struktur Gerakan sosial baru cenderung melintasi batasan-batasan nasional, para pelaku gerakan ini menyeberangi segala jenis perbedaan sosial, termasuk kasta, kelas, suku, agama, dan orientasi politik. Pada umumnya, Gerakan sosial baru menempatkan perhatian mereka pada upaya untuk mendemokratisasi struktur-

struktur kehidupan sehari-hari dan mengedepankan bentuk-bentuk komunikasi serta aksi kolektif.

Alain Touraine adalah seorang sosiolog Prancis yang lahir pada 3 Agustus 1925. Kajian – kajian akademisnya seputar Gerakan sosial. Dalam Stompzka, diketahui ciri khas Gerakan sosial yaitu ada 3 hal, yakni :

a. Gerakan ini memusatkan pada isu baru, kepentingan baru, dan medan konflik baru. Perhatian gerakan ini tertuju pada kualitas hidup manusia, identitas kelompok, memperluas ruang kehidupan, memperjuangkan masyarakat sipil dengan nilai lunak, non ekonomi, postmaterial. Gerakan ini tidak mengartikulasikan kebutuhan ekonomi, tetapi lebih memusatkan pada masalah kultural yang berkaitan dengan persoalan otonomi individual dan resiko baru yang tak terlihat yang mempengaruhi orang melalui cara yang hampir sama, terlepas dari posisi sosialnya.

b. Keanggotaan tidak dikaitkan dengan kelas khusus, tetapi lebih saling berpotongan dengan pembagian kelas tradisional, mengungkapkan masalah penting yang dihadapi anggota kelas yang berlainan.

c. Gerakan sosial baru biasanya mengambil bentuk jaringan yang luas dan relative longgar ketimbang menggunakan organisasi yang kaku dan hirarkis.

Menurut Singh, ada beberapa jenis atau ciri ideal Gerakan sosial baru yang dapat dikenali, sebagai berikut :

a. Sebagian besar, gerakan sosial baru mengembangkan konsepsi ideologis mereka berdasarkan asumsi bahwa masyarakat sipil saat ini terusik oleh upaya control yang dilakukan negara. Di era kontemporer, ekspansi negara sejalan dengan ekspansi pasar. Negara dan pasar dipandang sebagai dua entitas yang secara aktif menerobos hampir seluruh aspek kehidupan warga negara. Gerakan sosial baru mengangkat isu perlindungan diri komunitas dan masyarakat untuk melawan meningkatnya penetrasi oleh Lembaga – lembaga negara.

b. Gerakan sosial baru secara radikal meredefinisikan paradigma Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas. Marxisme memandang berbagai bentuk perjuangan dan pengelompokkan manusia sebagai pengelompokkan kelas. Namun, Gerakan sosial baru menentang pandangan bahwa perjuangan kontemporer seperti anti – rasisme, pelucutan senjata, feminisme, dan Gerakan lingkungan tidak dapt dikategorikan sebagai perjuangan kelas dan bukan sebuah Gerakan kelas.

c. Gerakan sosial baru melibatkan politik akar rumput yang kerap memprakasai Gerakan mikro. Mereka melibatkan secara horizontal asosiasi demokratis terorganisir yang terjalin dalam federasi longgar

baik di tingkat nasional maupun global. Umumnya, Gerakan sosial baru menanggapi isu – isu yang berkaitan dengan penurunan moralitas dalam struktur kehidupan sehari – hari dan focus pada bentuk – bentuk komunikasi dan identitas kolektif, daripada menargetkan domain ekonomi dan pemerintah. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk menata kembali relasi negara, masyarakat dan pasar untuk menciptakan ruang public yang berisi kebebasan individu, kolektivitas dan identitas selalu dapat didiskusikan dan diawasi.

d. Berbeda dengan Gerakan klasik, struktur Gerakan sosial baru didefinisikan oleh pluralitas cita – cita, tujuan, kehendak dan orientasi dan oleh heterogenitas basis sosial mereka. Sesuai esensinya, maka Gerakan sosial baru umumnya bersifar global dan tidak tersegmentasi. Actor – actor yang beroprasi dalam Gerakan sosial baru bukan karena kepentingan kelas mereka tetapi dengan alasan kemanusisaan.[4]

Nelson A. Pichardo menyatakan bahwa gerakan sosial baru memiliki karakter yang berbeda dengan gerakan sosial lama. Perbedaan yang ada dalam gerakan sosial ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Tujuan dan Ideologi
   Gerakan sosial baru memiliki karakteristik faktor sentral dengan pandangan ideologis yang berbeda dengan gerakan sosial lama. Gerakan ini menepis asumsi – asumi yang mengatasnamakan anti kapitalis, perjuangan kelas dan pengelompokkan di dasari pada konsep kelas seperti Marxian yang cenderung berusaha mengulingkan posisi pemerintah.

b. Taktik
   Taktik dalam gerakan sosial baru lebih mencerminkan orientasi ideologi, dimana gerakan sosial baru lebih suka untuk tetap berada di luar saluran politik normal, dengan menggunakan taktik yang mengganggu mobilisasi opini publik untuk mendapatkan pengaruh politik dan cenderung untuk melakukan demontrasi yang sangat dramatis.Gerakan sosial baru memiliki keyakinan pada karakter demokrasi yang modern dengan tidak representatif konsisten dengan orientasi taktis anti-institusionalnya.

c. Struktur
   Gerakan sosial baru memiliki bentuk anti institusional dengan ciri yang meluas bagaimana cara mereka mengatur. Gerakan ini berupaya untuk mereplikasi yang diwujudkan dalam organisasi mereka sendiri ke tipe perwakilan yang mereka inginkan. Dalam artian, mereka dapat mengatur diri sendiri dengan gaya cair untuk menghindari bahaya

[4] Oman Sukmana. (2016) Konsep dan teori Gerakan Sosial Baru. Malang. Intrans Publising. hlm 124-129

oligarki, merotasi kepemimpinan, memberikan suara secara komunal pada semua masalah mereka anggap sebagai karakter tidak manusiawi.

d. Partisipan
Partisipan gerakan sosial baru muncul dari kalangan kelas menengah baru yang bekerja di sektor ekonomi non produktif umumnya adalah kaum terdidik. Dalam hal ini partisipan yang terlibat pada gerakan ini tidak terikat dengan motif keuntungan melainkan untuk memperjuangkan terkait permasalahan sosial. Peserta gerakan ini tidak didefinisikan oleh batas-batas kelas tetapi ditandai oleh keprihatinan umum atas masalah sosial.

1.7 Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan faktor yang signifikan dalam dinamika konfigurasi politik pada periode tertentu, mampu merangsang proses politik dengan menunjukkan adanya pluralisme dan persaingan di dalam masyarakat. Kelompok kepentingan (interest group) seringkali di defenisikan sebagai, *a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests* (Benditt 1975:34).. Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Janda, Berry, & Goldman 1997). Dengan kata lain, maksud dan tujuan mereka adalah berupaya "memberikan pengaruh" terhadap proses pembuatan kebijakan pemerintah, dengan harapan agar sesuai dengan aspirasi dari kelompok yang mereka wakili.

Pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia kedua, pada era tahun 1950-an dan 1960-an di negara – negara Barat, kelompok kepentingan mulai berkembang pesat seiring dengan perluasan peran pemerintah ke berbagai aspek kehidupan. Perluasan birokrasi dan fungsi – fungsi pemerintahan, baik di tingkat local maupun nasional, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, telah menimbulkan respons dari berbagai kelompok dalam masyarakat yang merasa penting untuk terlibat dalam isu – isu tertentu. Fenomena ini juga sejalan dengan peningkatan meratanya tingkat pendidikan dan kesadaran politik, serta pertumbuhan keterampilan organisasional. Dinamika ini menandakan bahwa semakin banyaknya wilayah di mana pemerintah terlibat, semakin bertambah pula kepentingan – kepentingan khusus yang muncul untuk mempengaruhi kebijakan. Disamping itu, kemunculan kelompok kepentingan juga dipicu oleh munculnya isu – isu baru yang menjadi perhatian umum, baik di tingkat local, nasional maupun global. Bahkan, belakangan ini banyak kelompok kepentingan yang berjuang untuk isu – isu tunggal yang khusus, mulai dari masalah kekerasan terhadap anak, perdagangan bebas, kesetaraan gender, lingkungan, perdagangan manusia, hak asasi manusia, hutang luar negeri, masalah energi, sumber daya air, hak konsumen, perlindungan hewan, pendidikan kelompok marginal, ekonomi mikro,

hingga isu transgender dan sebagainya. Gerakan ini, untuk sebagian, merupakan bagian dari gerakan sosial baru yang terus memperoleh tempat dalam masyarakat modern.[5]

Dalam praktiknya, terdapat beragam jenis kelompok yang beroperasi dalam masyarakat dengan tujuan memengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. Sebagai entitas non-pemerintah, kelompok - kelompok tersebut mencakup berbagai bentuk, seperti kelompok profesional, serikat buruh, organisasi pedagang, pengusaha, kelompok keagamaan, persatuan pedagang, organisasi mahasiswa, lembaga pemikiran, asosiasi cendikiawan atau pakar, asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnik, regional, keturunan (wangsa), dan sebagainya.

Kelompok kepentingan pada prinsipnya dapat di kelompokkan menjadi dua kategori, yakni : Pertama, kelompok kepentingan privat ; Kedua, kelopok kepentingan publik. Kelompok kepentingan privat mencakup kelompok yang berupaya memperjuangkan kepentingan anggotanya, yang mewakili golongan tertentu, dalam konteks kehidupan umum. Contohnya melibatkan profesi seperti pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, dan golongan profesional lainnya, termasuk produsen yang memiliki kepentingan dalam sektor usaha tertentu. Sementara itu, kelompok kepentingan yang bersifat publik adalah kelompok yang lebih fokus pada upaya mempengaruhi pemerintah agar melaksanakan tindakan tertentu yang menguntungkan kepentingan umum secara menyeluruh, daripada hanya anggotanya. Contoh dari jenis kelompok kepentingan ini mencakup gerakan sosial yang memperjuangkan isu - isu lingkungan, pendidikan, pertambangan, perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen dan lain sebagainya.

Cara kerja kelompok kepentingan tidak melibatkan tekanan atau pemaksaan, melainkan bergantung pada penggunaan hubungan internal (lobbying) dan jaringan kerja yang intensif namun bersifat persuasif. Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat dibedakan dalam empat bentuk, yakni :

a. Kelompok Anomik : merupakan kelompok yang terbentuk secara spontan di antara elemen - elemen dalam masyarakat, bersifat sementara, dan tidak memiliki norma serta sistem yang terstruktur dengan jelas. Kelompok ini tidak membentuk koneksi formal dengan organisasi politik atau institusi lainnya. Struktur organisasinya sangat fleksibel, terbatas pada bentuk - bentuk seperti forum, komite, dan sejenisnya. Kelompok Anomik juga dapat membangun keberanian masyarakat dalam mengambil sikap yang berbeda dengan penguasa.

[5] Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, *15*(2).

b. Kelompok Non-Asosial : merupakan kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan kurang memiliki keteraturan, dengan kegiatan yang bersifat insidental. Dalam perspektif teoritis, aktivitas kelompok non - asosial mencerminkan ciri - ciri masyarakat yang masih belum berkembang, dimana loyalitas terhadap kelompok suku atau keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik.

c. Kelompok Institusional sering kali mendapatkan dukungan dari organisasi - organisasi seperti partai politik, perusahaan bisnis, badan legislatif, dan organisasi keagamaan. Kelompok ini memiliki karakteristik formal dan berperan dalam fungsi - fungsi politik dan sosial. Selain itu, kelompok ini memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk kebijakan pemerintah, dikarenakan kelompok ini memiliki basis yang kuat.

d. Kelompok Assosial melibatkan entitas seperti butuh, kelompok keagamaan, dan organisasi sosial. Secara spesifik, kelompok ini mengekspresikan kepentingan suatu kelompok khusus, melibatkan pekerja yang memiliki keahlian profesional, dan mengimplementasikan prosedur yang terstruktur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan mereka. Struktur organisasinya ditempatkan di atas kelompok non-assosional, dengan strategi dan tujuannya dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pembagian jenis – jenis kelompok kepentingan diatas, dapat dikatakan bahwa Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel masuk dalam kelompok kepentingan asosional, hal itu dikarenakan YPMP Sulsel hadir sebagai kelompok yang lahir dari masyarakat dengan struktur organisasi yang jelas yang bertujuan untuk menekan pemerintah agar terciptanya kesetaraan gender khususnya bagi kaum perempuan.

1.8 Kerangka Berfikir

YPMP Sulsel yang merupakan salah satu organisasi perempuan non pemerintah yang ada di Sulawesi Selatan, yang juga berperan sebagai kelompok kepentingan untuk memperjuangkan hak - hak perempuan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. YPMP Sulsel melakukan beberapa gerakan sosial baru yang dianggap sebagai upaya mereka untuk mendukung calon legislative perempuan di Kota Makassar. Adapun 3 upaya yang mereka lakukan yakni, Pertama YPMP Sulsel menuntut anggaran kepada pemerintah. Hal ini dilakukan agar YPMP Sulsel dapat menjalankan program – program kerjanya, seperti mengadakan pendidikan politik berupa seminar atau *workshop*. Kedua, YPMP Sulsel mempromosikan calon legislative perempuan kepada pemilih. Hal ini bersamaan dengan pemberian stiker dan pamphlet calon legislative perempuan tersebut. Selama mereka mempromosikan caleg, mereka juga mengedukasi warga sekitar dapil. Ketiga, YPMP Sulsel mengadakan forum diskusi dengan beberapa calon legislative perempuan dan membahas mengenai kiat – kiat pemenangan calon legislative tersebut.
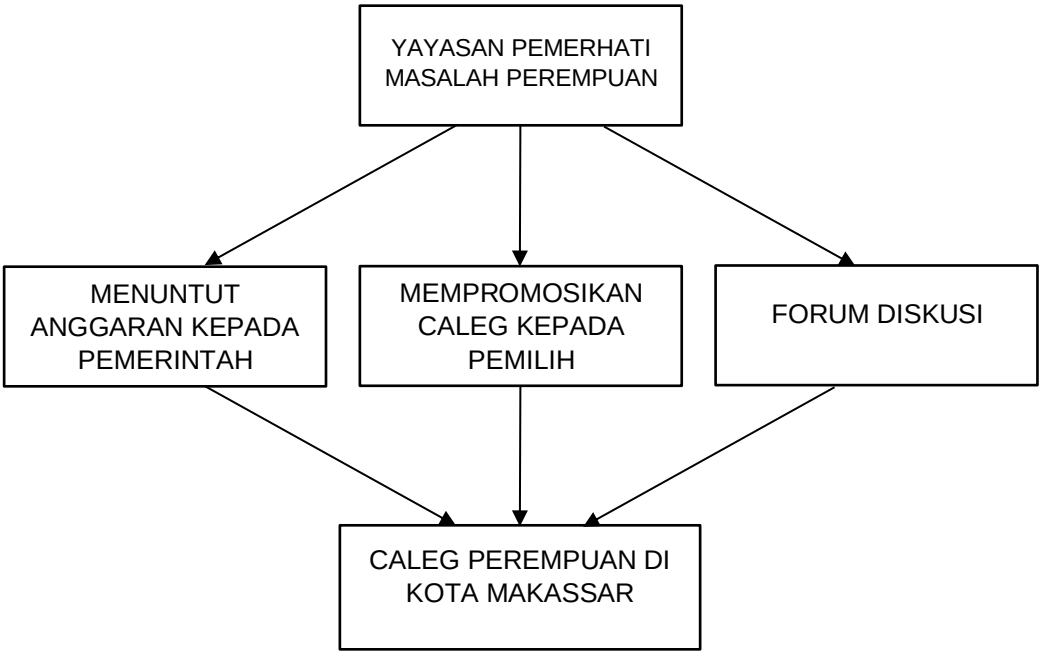
1.9 Skema Berfikir